

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Objek Penelitian

#### 1.1.1 Sejarah Singkat BPS(Badan Pusat Statistik)

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheid en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu *Afdeling A* (Bagian Riset) dan *Afdeling B* (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan

dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi "**Badan Pusat Statistik**", dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai "**Hari Statistik**". Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia(BPS info okukab (2019).

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.  
Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

### **1.1.2 Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

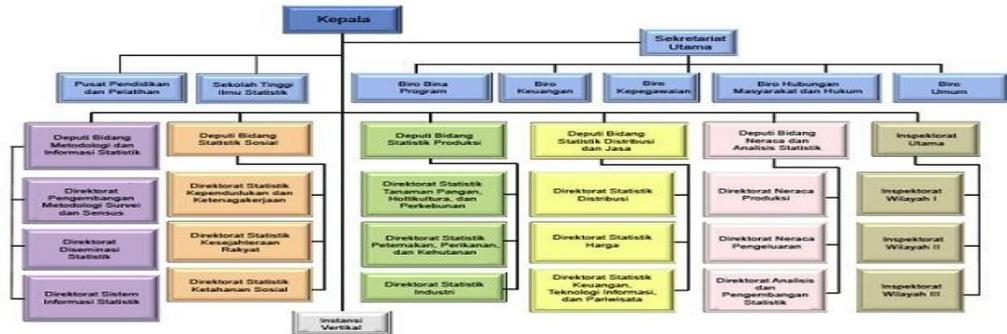
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

#### **b. Misi**

- 1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- 2) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- 3) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Struktur dalam sebuah kantor dapat memberikan informasi terhadap anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Bertanggung jawab terhadap kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud.

Berikut Struktur Organisasi pada Badan Pusat Statistik.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

Sumber : BPS info okukab (2019)

Tidak hanya BPS Kabupaten Oku saja, tetapi BPS dari kabupaten dan kota lain pun ada, disini peneliti mengambil 6 BPS lagi yaitu terdapat di Kabupaten dan kota, inilah 6 kantor BPS diantaranya 3 Kabupaten dan 3 Kota,

Berikut alamat kantor BPS:

TABEL 1.1  
ALAMAT KANTOR BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kantor	Alamat
1	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Jl. Dr. Moh. Hatta No.987A Kelurahan.KemalaRaja Kec. Baturaja.
2	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kota Baru Selatan, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Wetan Sumatra Kidul
3	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Jl. Palembang- Prabumulih Km 33 Desa Tanjung Pering 30813 Indralaya
4	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Jl. Raya Ranau Km 7.5, Muaradua, Rantau Panjang, Ogan Komering Ulu Selatan
5	BPS Kota Palembang	Jl. Pangeran Ario Kesuma Abdul Rohim No.2
6	BPS Kota Lubuklinggau	Jalan Perumdam No. 01 Kelurahan Lubuk Tanjung Lubuklinggau
7	BPS Kota Pagar Alam	Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia

Sumber: Analisi Peneliti (2019)

### **1.1.3 Tugas dan Fungsi BPS**

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

a. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

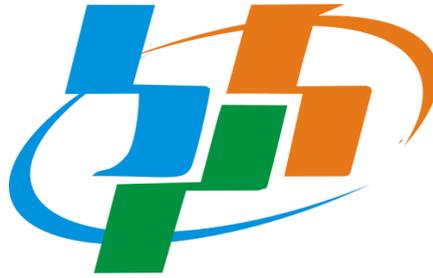
b. Fungsi

- 1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik.
- 2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.
- 3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.
- 4) Penetapan sistem statistik nasional.
- 5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kewenangan

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- 4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- 5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.1.4 Logo Badan Pusat Statistik



**Gambar 1.2 Logo Badan Pusat Statistik**

*Sumber : BPS info okukab (2019)*

Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan disetiap warna memiliki arti khusus, yaitu:

**a. Biru**

Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).

**b. Hijau**

Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).

**c. Orange**

Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).

#### **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Kewirausahaan berkaitan erat dengan pencarian rezki untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun kewirausahaan lebih luas dari sekedar berkerja dalam rangka mencari rezki. Sebagaimana terlihat pada definisi wirausaha, untuk berwirausaha seseorang harus mempunyai sikap dan sifat yang rajin, tekun, kreatif dan imajinatif, inovatif, yang berani mengambil resiko. Meskipun demikian, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam keberhasilan pembangunan suatu usaha tidak terlepas dari kontribusi para *entrepreneur* yang telah memperkaya pasar dengan produk-produk yang inovatif dan mereka menciptakan lapangan kerja baru (Sonny, 2012: 931). Dari teori di atas bahwa kegiatan berwirausaha sangat berperan penting dalam perkembangan suatu negara. Dengan adanya kontribusi dari para pelaku *entrepreneur* dapat memberikan dampak

yang jelas bagi masyarakat sekitarnya seperti menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di suatu negara dan dengan adanya kegiatan *entrepreneur* pastinya akan dapat menghasilkan produk atau jasa yang inovatif sehingga bisa meningkatkan kualitas jual beli di suatu negara dan akan berdampak pada perekonomian nasional.

Meskipun merupakan negara kepulauan yang hanya berpenduduk 5,6 juta orang, Singapura telah menjadi salah satu pusat inovasi teknologi terdepan di dunia, dan tempat yang tepat untuk para pengusaha besar atau kecil, lokal atau internasional. Saat ini Singapura meningkat sebanyak 7%. Sebuah laporan yang diterbitkan tahun lalu oleh proyek Startup Genome yang berbasis di AS, yang mencakup 10.000 perusahaan baru dan 300 perusahaan mitra, menyatakan bahwa Singapura yang kecil telah melampaui teknologi Valley Silicon Valley sebagai nomor satu di dunia untuk talenta startup. Laporan itu mengutip kebijakan inovatif negara itu, subsidi pemerintah yang signifikan, kemudahan memulai bisnis, dan lokasi geografis yang bertindak sebagai pintu gerbang yang efektif bagi hampir 600 juta orang yang tinggal di kawasan Asia Tenggara sebagai alasan keberhasilannya. Kami berbicara dengan Jonathan Lim, direktur Enterprise Singapore Startup dan Global Innovation Alliance (GIA), untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekosistem startup negara dan rencana masa depan pemerintah. Kami fokus untuk membangun startup teknologi yang lebih mendalam di berbagai bidang seperti medtech, fintech, manufaktur dan teknik canggih, foodtech, dan agritech. Ada peluang besar di bidang ini. Singapura dapat memanfaatkan kekuatan kualitas, kepercayaan, dan koneksi regional kami untuk menonjol. Ini juga sejalan dengan RIE2020 pemerintah (Riset, Inovasi, dan Perusahaan, rencana yang berfokus pada kemampuan pendalaman dalam ilmu kesehatan dan biomedis, manufaktur dan teknik canggih, solusi dan keberlanjutan perkotaan, layanan dan ekonomi digital) rencana litbang nasional, di mana S \$ 19 miliar telah dilakukan selama 2016-2020 di beberapa sektor ini. (Sumber: Entrepreneur Asia Pacific(2018))

Menurut catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, jumlah pengusaha di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya hanya sebesar 1,67% menjadi 1 dari total jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sebanyak juta jiwa Kementerian 18). Rasio wirausaha kita berdasarkan data BPS jumlah wirausaha BPS meningkat 1 . Sebelumnya 1,67%

dari 225 juta penduduk, Kenaikan rasio kewirausahaan itu juga dianggap sebagai salah satu pencapaian yang layak diperhitungkan selama empat tahun kinerja Pemerintah Jokowi-JK khususnya pada sektor koperasi dan UKM (Puspayoga,2018). Kementerian Koperasi dan UKM dalam empat tahun terakhir, menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain. Kewirausahaan dinilainya sangat penting untuk menumbuhkan budaya ekonomi mandiri sehingga semangat masyarakat bukan pencari kerja melainkan pencipta lapangan kerja.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Nasrun Umar saat membuka Rapat Koordinasi Penyaluran Kur dan Peningkatan Daya Saing UMKM Provinsi Sumsel, bertempat di Graha Bina Praja Palembang, Selasa (19/9). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM merupakan mayoritas jenis usaha yang di Indonesia hingga mencapai 99.9% dengan pelaku usaha mencapai 57.8 juta. Untuk sektor UMKM di Provinsi Sumsel sendiri, Nasrun mengungkapkan, bahwa pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM mencapai 4,8% per tahun. Pertumbuhan ini perlu kita pertahankan atau bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini didorong oleh belanja infrastruktur dalam rangka Asian Games 2018, apalagi Pemerintahan Provinsi Sumsel pada tahun 2017 telah menganggarkan dana sebesar Rp 2,69 Miliar untuk mendukung Program UMKM yang dialokasikan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel. Dana tersebut digunakan untuk program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, perkuatan permodalan UMKM, dan peningkatan kegiatan usaha UMKM. Pemerintah pusat juga telah banyak memberikan dukungan bagi sektor UMKM, berbagai bentuk skema pembiayaan, saah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dalam APBN tahun 2017 Pemerintahan juga mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp 9,02 Triliun. Ini semua bentuk dukungan pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian global. Oleh karena itu Nasrun mengharapkan dengan adanya kegiatan ini para peserta UMKM dan Pemerintah

terkait dapat berpartisipasi secara maksimal dalam memberikan pandangan, masukan dan saran untuk perbaikan dan keberhasilan program pelaksanaan KUR ini kedepannya. Kami berharap pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi komitmen kita bersama sebagai upaya peningkatan dukungan bagi UMKM. Kepala Kakanwil Dirjen Pembendaharaan (DJPBN) Provinsi Sumsel mengatakan ada beberapa kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Diantaranya mulai dari sosliasasinya mungkin dirasakan kurang, terus pendampingan terasa kurang, untuk itu beliau harapkan adanya rapat koordinasi ini masalah yang di hadapi UMKM dapat selesai disini. *Sumber: kordanews sumsel (2018)*

Menjadi pengusaha dan sukses, bisa dibilang menjadi keinginan semua orang. Bagi 'orang gajian' termasuk pegawai swasta maupun BUMN berpeluang menjadi pengusaha sukses masih terbuka lebar. Disini peneliti mengambil salah satu pegawai BUMN yang menjalankan wirausaha, Majalah Franchsie (Djoko Kurniawan,2016) menceritakan tentang kisah bapak Dewanto Purnomo mengawali karir sebagai pegawai bank di Bank Danamon selama 5 tahun (1995-2000). Di Danamon waktu itu ia hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 2 juta per bulan. Kemudian beralih menjalani pekerjaan di salah satu BUMN yaitu Permodalan Nasional Madani (Persero) selama 11 tahun (2000-2011) dengan gaji Rp 7-10 juta rupiah per bulan. Dengan adanya mindset wirausaha yang berkarakter dan berusaha aktif dapat mengembangkan usaha dengan baik. Walaupun, sejatinya kegiatan wirausahanya dimulai tahun 2005 dengan membeli produk franchise mie ayam. Kemudian berkembang hingga ia memiliki 1 gerobak mie ayam dan berkembang kembali dengan membeli 45 master franchise di Bekasi. Mencatat keberhasilan pada pasar domestik hingga saat ini, Dewanto masih punya keinginan untuk memperkenalkan produknya keluar Negeri, Menurutnya pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang tata cara ekspor dan ketentuan ekspor. Selain itu bahan baku yang sulit didapat dikeluhkan.

Didalam perusahaan besar pun masih banyak pegawainya yang menjadi wirausaha. Salah satunya perusahaan PT.INAKO, PT INAKO yang didirikan pada tahun 1982 adalah perusahaan yang terdaftar sebagai distributor PT Krakatau Steel. Produk besi yang disetujui oleh PT INAKO terbatas pada produk bahan baku besi terdiri dari plat besi disetujui (gulungan) dengan berbagai ukuran ketebalan. Pegawainya diperbolehkan melakukan perdagangan sendiri dengan cara mengambil bahan dari sumber lain dengan menggunakan fasilitas dan nama perusahaan (yang tentunya jauh lebih mudah dari pada menggunakan nama pribadi mengingat PT

INAKO memiliki reputasi baik di pasar besi). Pegawai di beri kebebasan penuh untuk menentukan dirinya sendiri. Kondisi ini paling tidak membuka kemungkinan untuk berkembangnya pegawai yang berjiwa entrepreneur dalam divisi ini untuk menemukan cara-cara yang dapat mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin. Dengan sikap general manager yang memberikan dukungan penuh pada penentuan diri sendiri ini, pada gilirannya menciptakan keberanian pada seorang pegawai untuk mencoba mengusulkan suatu ide tentang perdagangan di luar produk besi, yaitu produk abrasif, karena pegawai bersangkutan mempunyai jaringan untuk produk tersebut dan merasa yakin akan kesuksesannya. General manager bersangkutan membuka diri dan memberikan dorongan kepada pegawai bersangkutan untuk mempelajarinya lebih lanjut (melakukan feasibility study). Semua itu dibutuhkan keberanian dalam mengambil resiko.

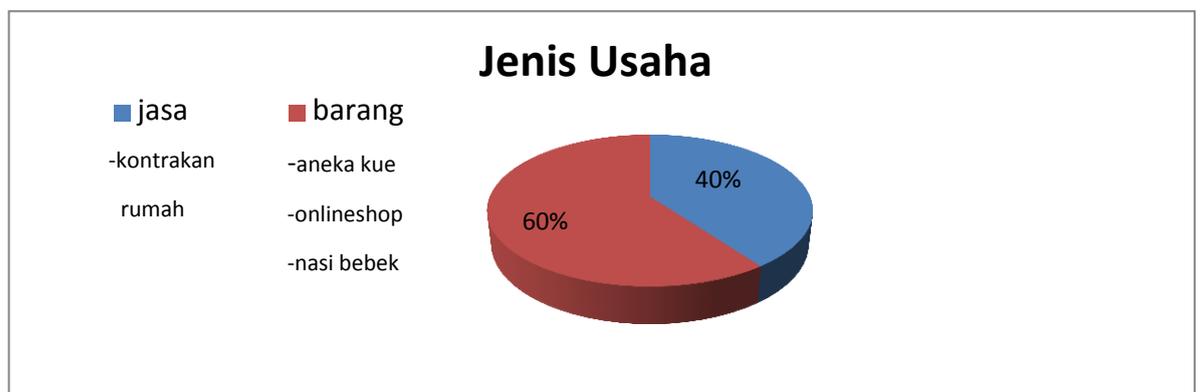
Perkembangan zaman menuntut semua orang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tidak hanya para pengusaha, di BUMN saja, tetapi di pemerintahan daerah (PEMDA) pun ada pada pegawai Badan Pusat Statistik (BPS). BPS adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada pegawai BPS juga memiliki wirausaha, terutama disalah satu BPS, yaitu BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Saat ini pun para pegawai sudah banyak yang bekerja sambil membuka usaha. Hal ini dibuktikan dari 25 orang pegawai BPS Kabupaten OKU terdapat sebanyak 20 orang (Peneliti, 2019).

Peluang usaha merupakan sebuah kebutuhan utama dari *entrepreneurship*. Fungsi wirausaha harus dikelola dengan tata kelola terbaik untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dari dalam. Perusahaan dengan konsep berwirausaha haruslah menciptakan lingkungan dan budaya perusahaan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya semangat berwirausaha di dalam perusahaan. Penerapan konsep usaha yang efektif dalam perusahaan dapat berupa kebijakan yang mengatur struktur formal untuk berwirausaha, komitmen serta tanggung jawab dari pegawai serta pimpinan untuk berkontribusi cara kerja dan ide-ide untuk menjaga kinerja dan daya saing perusahaan, upaya nyata dari perusahaan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam dalam kemampuan atau multi talenta, integritas perusahaan dalam merancang jalur karir yang menarik dan kompetitif dan juga menciptakan konsep insentif yang membuat pekerja selalu setia seumur hidup bersama perusahaan, kemauan dan kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana

untuk pengembangan berwirausaha di dalam perusahaan. (Denada Tirta Amertha, 2016)

Berdasarkan informasi dari salah satu BPS, yaitu BPS OKU terdapat 20 orang yang bekerja sekaligus sebagai wiraswasta dan 5 orang yang bekerja tidak sebagai wiraswasta di BPS Kabupaten OKU. Peneliti melakukan pra survei penelitian pada 10 pegawai BPS Kabupaten OKU. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Dari 10 responden terdapat 6 laki-laki dan 4 perempuan. Hal ini sudah dilakukan pembagian secara merata oleh peneliti kepada pegawai BPS Kabupaten OKU.

Sedangkan berdasarkan karakteristik jenis usaha dapat dilihat pada gambar 1.3 ini:



Gambar 1.3 Jenis Usaha yang Dijalankan oleh Pegawai BPS Kabupaten OKU

*Sumber:* Analisi Peneliti (2019)

Peneliti telah melakukan pra survei penelitian pada 10 pegawai BPS Kabupaten OKU. Dari 10 responden terdapat 4 usaha jenis jasa, 6 usaha jenis barang. Untuk jenis usaha jasa yaitu kontrakan rumah, laundry, dan konveksi baju, sedangkan untuk jenis usaha barang yaitu jualan kue, onlineshop, nasi bebek, rumah makan keping, bucket bunga, dan pulsa elektrik. Berdasarkan lama waktu pengembangan usaha yang sudah dijalankan, untuk jangka waktu lamanya usaha, dari 10 responden pegawai tersebut yaitu mulai dari 1 tahun bahkan yang paling lama yaitu 5 tahun berwirausaha. Untuk melakukan pengembangan usaha ini dilakukan jangka waktu yang cukup lama.

TABEL 1.2  
HASIL PRA SURVEI ALASAN, FAKTOR DAN TANTANGAN PEGAWAI BPS  
DALAM MENJALANKAN USAHA SAMPINGAN

No	Nama	Jenis usaha	Alasan /faktor	Tantangan
1	Budiriyanto (kepala Kantor)	Kontrakan rumah	1. Usaha sampingan pensiunan 2. Memaksimalkan pemasukan	Biaya perawatan
2	Laidayati (Kasub Bag)	Kontrakan rumah	1. Kebutuhan rumah semakin meningkat 2. Tabungan hari tua	Biaya perawatan dan balik modal cukup lama  <i>(bersambung,</i>
3	Nur Hafizah (Staff Stat Produksi)	Jualan kue	1. Keperluan biaya rumah tangga 2. Faktor ekonomi	<i>jumlah mencari</i> bahan bagus dan murah
4	Ekky Kesit Novianti (Pramubakti kantor)	Online pakaian	1. Biaya hidup 2. Mengembangkan bakat	Seringnya overload pengirim an barang
5	Jemmy Saputra (Koordinator statistik)	Konveksi baju	1. Menambahkan penghasilan 2. Mengembangkan bakat	Barang kebanyakan harus impor
6	Zulhidayat (Staff mitra)	Kuliner nasi bebek	1. Penghasilan tambahan 2. Usaha sampingan pensiunan	Harga bebek terkadang mahal
7	Awaludin Saputra (Kasi Stat. Produksi)	Rumah makan keping	1. Hobi 2. Menambahkan penghasilan	Bahan pokok keping mahal
8	Deki Zulkarnaen (Kasi Statistik Sos)	Laundry	1. Menambah penghasilan 2. Faktor ekonomi	Persaingan usaha sejenis

9	Sulastri (bendahara)	Bucket bunga	1. Faktor ekonomi 2. Penambah penghasilan	Permintaan yang tidak menentu
10	Erwin Majid (Stat Tata Usaha)	Pulsa elektrik	1. Hobi 2. Mendapatkan tambahan uang	Minim resiko, orang tidak akan beli pulsa setiap saat

*Sumber: Analisis Peneliti (2019)*

Peneliti melakukan pra penelitian terhadap PEGAWAI BPS OKU dimana pegawai nya memiliki usaha sampingan, diantaranya terhadap 10 responden pra penelitian, terdapat 6 laki-laki dan 4 perempuan, adapun jenis usaha terdapat 4 pegawai usaha jasa, 6 pegawai usaha barang, untuk jangka waktu lamanya usaha yang sudah dijalankan mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Sedangkan untuk faktor yang memicu pegawai BPS memiliki usaha sampingan adalah sebagai penghasilan tambahan, tabungan saat pensiun dan hobi.

Tidak hanya BPS OKU saja, peneliti melakukan pra survei terhadap pegawai BPS Kota Lubuklinggau dimana pegawainya memiliki usaha sampingan, diantaranya terhadap 10 responden pra penelitian, terdapat 5 laki-laki dan 5 perempuan, adapun jenis usaha terdapat 5 pegawai jasa, 5 pegawai usaha barang, untuk jangka waktu lamanya usaha yang sudah dijalankan mulai dari 1 dan yang paling lama yaitu 5 tahun. Sedangkan untuk faktor yang memicu pegawai BPS memiliki usaha sampingan adalah sebagai penghasilan tambahan, tabungan saat pensiun.

Kesadaran berwirausaha penduduk Indonesia masih sangat rendah. Bagi sebagian mereka yang bekerja pada instansi swasta maupun pemerintah sudah merasa nyaman dengan menerima gaji rutin setiap bulan. Berapapun besarnya gaji yang diterima, mereka syukuri. Mereka berpikir diluar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung dirinya. Ada banyak hal yang mereka pertimbangkan saat untuk memutuskan resign dari pekerjaan tetapnya dan memilih untuk berwirausaha. Contoh terbatasnya modal, bingung menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, relasi bisnis masih terbatas, hingga perasaan takut gagal. (viva.co.id, 2018).

Berwirausaha dipilih sebagai fenomena yang paling berpengaruh dan proaktif terhadap daya saing kultural (Hult, Snow, dan Kandemir, 2003). Peluang usaha ini menjadi hal yang paling krusial sebelum membuka bisnis. Bahkan kita sudah harus

memikirkan beberapa langkah ke depan soal seberapa langgeng *life span* peluang usaha yang kita bidik. Faktanya kebanyakan calon pebisnis lebih memikirkan apa yang sedang tren sekarang. Akhirnya, saat pasar mudah sekali jenuh mereka mengalami kerugian besar. Peluang usaha merupakan kesempatan dalam menjadi Entrepreneurship. Oleh sebab itu, kesempatan peluang usaha ini harus dikelola dengan tata kelola terbaik untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dari dalam. Perusahaan dengan konsep berwirausaha efektif haruslah menciptakan lingkungan dan budaya perusahaan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya semangat membuka peluang usaha di dalam perusahaan. Untuk penerapan konsep wirausaha yang efektif dalam perusahaan diperlukan kebijakan yang mengatur struktur formal untuk berwirausaha, diperlukan komitmen dan tanggung jawab dari pegawai serta pimpinan untuk mengkontribusikan cara kerja dan ide-ide buat menjaga kinerja dan daya saing perusahaan, diperlukan upaya nyata dari perusahaan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam kemampuan atau multi talenta, diperlukan integritas perusahaan untuk merancang jalur karir yang menarik dan kompetitif dan juga menciptakan konsep insentif yang membuat pekerja selalu setia seumur hidup bersama perusahaan. Kemauan dan kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana buat pengembangan entrepreneur di dalam perusahaan, akan menjadikan perusahaan selalu memiliki para eksekutif senior dan junior untuk proyek-proyek prospektif. Dan juga, perusahaan berpotensi untuk mendapatkan peluang ataupun menjaga peluang-peluang yang sudah ada. Selanjutnya, perusahaan bisa terus unggul di tengah ladang persaingan yang sangat keras saat ini. Menjadikan setiap pegawai dan pimpinan sebagai seorang entrepreneur akan membuat perusahaan jeli mengenali aneka peluang, risiko, dan Pekerjaan sampingan adalah sebuah bisnis atau kegiatan yg membuat keuntungan secara finansial pada luar pekerjaan rutin yg harus dikerjakan sehari hari, sebagai akibatnya terkadang tidak terbatas. Pengambilan resiko yang terkalkulasi merupakan kemampuan untuk mengambil kesempatan yang sudah diperhitungkan dan menganggap kegagalan sebagai suatu pengalaman belajar. Kreativitas merupakan kemampuan untuk memperkirakan berbagai kemungkinan di masa depan dan secara proaktif menciptakan apa yang diidamkan. Dikatakan bahwa empat komponen berbasis pasar dalam kerangka daya saing kulutral memberikan beberapa model yang dapat diterapkan pada berbagai jenis lembaga perguruan tinggi. Penemuan model terbaik yang sesuai dengan jenis

organisasi akan mengarahkan fokus yang lebih baik pada penentu utama yang akan menyumbangkan pada keunggulan organisasi.

Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), para pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperbolehkan untuk berbisnis, namun terdapat syarat yaitu tidak boleh ada konflik kepentingan dengan posisi yang dijabatnya. Menurut mantan sekretaris Kementrian BUMN, M. Said Didu, sesuai peraturan pegawai BUMN tidak dilarang untuk berbisnis selama tidak menyalahgunakan jabatannya untuk sengaja mengembangkan bisnisnya. Aturan ini diperkuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 (m.detikfinance.com, 2012). Untuk di Provinsi Sumatera Selatan menurut kepala Kantor Kabupaten BPS Ogan Komering Ulu (OKU) Ir. Budiriyanto memperbolehkan pegawai nya untuk berbisnis asal tidak mengganggu aktivitas kerja di perusahaan.

Pegawai BPS Sumatera Selatan memiliki pendapatan yang masih tergolong kecil dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 2.805.751 rupiah per bulannya. Hal ini yang menjadikan pegawai BPS turut memilih untuk membuka usaha sampingan sebagai pendapatan tambahan (gajimu.com, 2019).

Memulai usaha sampingan dan menjadi seorang pengusaha bisa jadi merupakan tantangan tersendiri bagi pegawai yang sudah memiliki penghasilan/ pekerjaan tetap. Untuk memulainya tentu bukanlah perkara yang mudah, ada banyak sekali rintangan yang akan dihadapi, apalagi bagi kita yang belum memiliki pengalaman dalam menjalankan sebuah usaha/ bisnis. Selain itu, sebagai pegawai kita juga memiliki tanggung jawab utama yang tidak dapat disampingkan dan mesti manajemen dengan baik. Pentingnya usaha atau bisnis sampingan ini cukup menjanjikan untuk dijalani. Untuk memulai sebuah usaha/ bisnis, yang walaupun itu adalah sebuah usaha/ bisnis sampingan, perlu untuk belajar dan mengetahui apa saja yang perlu dipahami agar bisnis sampingan ini dapat berjalan sukses dan lancar. Dengan adanya perencanaan bisnis yang baik, diharapkan menjadi strategi untuk memperkecil efek gangguan/ kegagalan dan untuk memungkinkan proses bisnis terus berlangsung (awambicara.id, 2018).

Perkembangan bisnis, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta globalisasi yang dinamis menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya persaingan antar perusahaan yang semakin ketat. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk melakukan peningkatan kemampuan, kualitas dan terus berinovasi

untuk mampu bersaing di pasar global. Pegawai sebagai salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan, dituntut untuk mampu berpikir secara kreatif (*think out of box*) dengan memanfaatkan segala *resources* yang dimiliki oleh perusahaan sehingga tercipta sebuah karya yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan memanfaatkan segala *resources* perusahaan serta adanya dukungan penuh dari manajemen perusahaan untuk menghasilkan produk-produk baru yang memiliki daya jual tinggi untuk bersaing di pasar, dalam sebuah perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan (*company growth*). Lingkungan dan karakteristik organisasi (*organization characteristics*) merupakan dua dimensi yang mempengaruhi usaha sampingan di suatu perusahaan. Program pelatihan berwira usaha di PT. Pertamina Training and Consulting dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kemampuan pegawai mengenai berwirausaha, mengasah ketajaman berpikir dalam menganalisa masalah secara tuntas serta melatih pegawai untuk berpikir komprehensif (menyeluruh) sehingga diharapkan pertumbuhan (*company growth*) dapat bergerak ke arah positif.

Penelitian sebelumnya memperlihatkan adanya hubungan kesepakatan berwirausaha. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Friana dan Ina Indriana (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pendorong berwirausaha dapat dijelaskan oleh faktor inovasi, risiko kecenderungan dalam menghadapi tantangan baru, energi kompetitif, proaktif, namun tidak dapat dijelaskan oleh faktor kecenderungan risiko dalam menghadapi ketidakpastian dan otonomi. Fenomena ini menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Para Pegawai Pemerintah Daerah Untuk Menjadi Pengusaha (Studi pada 7 Kantor BPS Provinsi Sumatera Selatan)”

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Apa faktor-faktor yang mendorong para pegawai pemerintah daerah untuk menjadi pengusaha (studi pada 7 kantor bps provinsi sumatera selatan)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

Apa faktor-faktor yang mendorong para pegawai pemerintah daerah untuk menjadi pengusaha (studi pada 7 kantor bps provinsi sumatera selatan)?

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, di antaranya:

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan dan faktor- faktor yang mendorong para pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi entrapreneur. Penelitian ini juga berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah kinerja semangat berwirausaha, serta menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan dalam kajian pengembangan kewirausahaan.

##### **1.5.2 Aspek Praktis**

Melalui penelitian ini, pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan pengambilan keputusan bahwa bisa berbisnis meskipun sudah memiliki pekerjaan tetap. Pada hasil penelitian ini dapat mengetahui juga potensi dalam diri dan dikembangkan pada pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Para Pegawai Pemerintah Daerah Untuk Menjadi Pengusaha (Studi Pada 7 Kantor BPS Provinsi Sumatera Selatan)”. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian, dan Ruang Lingkup Penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Oprasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran, Tahapan Penelitian, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Realibilitas, Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan identifikasi masalah serta tujuan penelitian. Dalam bab ini berisi karakteristik responden, uji analisis faktor, dan pembahasan yang disusun secara *detail*.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil dari pembahasan. Sedangkan saran- saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu saran praktis dan saran teoriti.